

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg)

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia**



OLEH
NORMAN SUSANTO
2002190099

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Norman Susanto
NIM : 2002190099
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul "**Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg)**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 24 Januari 2023



Norman Susanto
2002190099



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

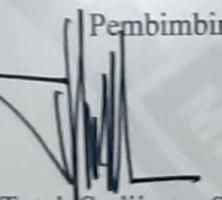
Oleh

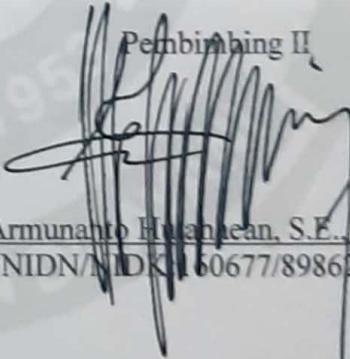
Nama : Norman Susanto
NIM : 2002190099
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

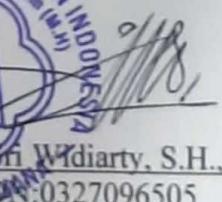
Jakarta 24 Januari 2023

Menyetujui:

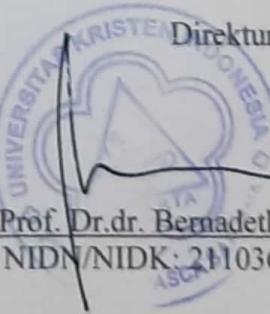
Pembimbing I

Dr.drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.
NIDN/NIDK: 211036/8931720021

Pembimbing II

Dr.Arnumunto Huananean, S.E., S.H., M.H.
NIDN/NIDK: 160677/8986240022

Mengetahui

Universitas Kristen Indonesia
Magister Hukum (FH)
JAKARTA
Program Studi
Dwi Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN/NIDK: 0327096505


Direktur

Prof. Dr.dr. Bernadetha, M.Pd., PA.
NIDN/NIDK: 211036/8931720021




**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 24 Januari 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Norman Susanto
NIM : 2002190099
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul
“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 27/PID.SUS-TPK/2021/PN BDG)”

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji

Jabatan dalam Tim Penguji

Tanda tangan

Dr. drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. Ketua

Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H. Anggota

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. Anggota

Jakarta 24 Januari 2023



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

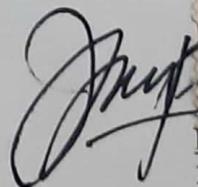
Nama : Norman Susanto
NIM : 2002190099
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta,



Norman Susanto
2002190099

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg)”. Penelitian ini dibuat disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Tesis serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulis dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Selama belajar di program studi Hukum UKI, penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan tesis ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh orang-orang disekitar penulis. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis.
3. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis.
4. Prof. Dr. dr. Bernadetha, M. Pd., PA. Selaku Direktur PPs UKI yang mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini

5. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH.,MH selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga selaku penguji sidang tesis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum dan seluruh staff PPs Universitas Kristen Indonesia yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan para beliau penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat didedikasikan untuk kesuksesan penulis di hari-hari yang akan datang.
7. Teman- teman mahasiswa Angkatan 2020 MH UKI yang selalu memberikan dukungan positif dan memberikan kesempatan untuk maju berkarya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati.

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Ayahanda (Alm) H. Irwan Mihwan dan Ibunda tercinta (Alm) Supiati, yang telah melahirkan, merawat, mengasuh, serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada istri tercinta Fitria Rachmawati, S.E. dan ketiga anak saya yang menjadi motivasi dalam penyelesaian tesis ini, yaitu Kevin Dhiafadhil Mihwan, Khanza Rumaisha Mihwan dan Kaeysa Aqila Susanto, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasa kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis berharap semoga hasil tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Amin.

Jakarta, 24 Januari 2023

Norman Susanto
NIM: 2002190099

DAFTAR ISI

LEMBAR KEASLIAN KARYA TULIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	11
1.3.1 Maksud Penelitian	12
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
1.4.1 Kerangka Teori.....	13
1.4.2 Kerangka Konsep	18
1.5. Metode Penelitian.....	20
1.5.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
1.5.2 Tipe Penelitian.....	21
1.5.3 Sumber Data	21
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	22
1.6. Analisa Data	22
1.7. Keaslian Penulisan	23
1.8. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
2.1. Tindak Pidana	27
2.2. Unsur- Unsur Pidana	29
2.3. Teori Kepastian Hukum.....	31
2.4. Teori Pemidanaan	35
2.5. Tindak Pidana Korupsi	38
2.6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	41
2.7. Pengelolaan Aset Desa	43
2.8. Pengertian Kepolisian.....	45
2.9. Peran Penyidik Kepolisian atas Tindak Pidana Korupsi	52
 BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI TANAH KAS DESA DALAM UU No. 31 TAHUN 1999 JO UU No. 20 TAHUN 2001 DI DESA SATRIA JAYA KEC. TAMBUN UTARA KAB. BEKASI JAWA BARAT STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 27/PID.SUS-TPK/2021/PN BDG	56
3.1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Kas Desa.....	56
3.1.1. Ketentuan Umum Dalam Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.....	56
3.1.2. Jenis Kekayaan Desa	56
3.1.3. Aturan Pengelolaan Kekayaan Desa.....	57
3.1.4. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	57
 BAB IV PERANAN PENYIDIK SERTA HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH POLISI DALAM MELAKUKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI TANAH KAS DESA DI DESA SATRIA JAYA KEC. TAMBUN UTARA KAB. BEKASI JAWA BARAT	74
4.1. Pengaturan Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi	74
4.2. Peranan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP	81

4.3. Tinjauan Tentang Efektivitas.....	91
BAB V PENUTUP.....	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97



Abstrak

Dampak dari kejahatan korupsi tidak saja menghancurkan harapan masyarakat baik di kota maupun pedesaan, melainkan juga mempengaruhi bagi kemajuan dan daya saing bangsa. Korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan, dengan menyalahgunakan kekuasaan, menyebabkan perkembangan korupsi sulit diberantas, sebab sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik, juga sistem *check and balances* yang lemah di antara ketiga kekuasaan pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) membuat korupsi menjadi membudaya. Dalam rangka pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana korupsi merupakan bagian dari upaya ditempuh dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Diperlukan kemampuan dan komitmen yang tinggi dari penegak hukum dalam hal ini penyidik dan institusi Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sedemikian rupa sehingga kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Polri dapat dilakukan dengan lebih optimal, dikarenakan masih belum Optimalnya penegakkan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis tindak pidana korupsi tanah kas desa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Di Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg dan untuk mengetahui peranan penyidik serta hambatan- hambatan yang dihadapi dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi tanah kas desa Di Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Jenis dan penyebab penyelahgunaan aset desa yang dikemukakan: a) Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme), b) Tidak sesuai rencana: tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi, c) Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) khususnya pengadaan barang dan jasa, d) Pengadministrasian laporan keuangan: *mark-up* dan *mark-down*, *double counting*, e) Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi, f) Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan, g) Penyelewengan aset desa: penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis *property*, h) Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg bahwa unsur korupsi tidak ditemukan berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 tahun 2001 maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Kata Kunci: *Korupsi, Aset Desa, Penyidik POLRI.*

Abstract

The impact of corruption crimes not only destroys the hopes of people in both urban and rural areas but also affects the progress and competitiveness of the nation. Corruption is closely related to power; by abusing power, it causes the development of corruption, which is difficult to eradicate because a system of governance that is not organized in an orderly manner and is not well supervised, as well as a weak system of checks and balances between the three powers of government (legislative, executive, and judicial), make corruption become a culture. In order to eradicate corruption, the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999, in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001, on the Eradication of Corruption, has been enacted. The participation of the police in the investigation of corruption crimes is part of the efforts taken in law enforcement efforts to eradicate corruption crimes. Because there is still no optimal enforcement of corruption crimes carried out by law enforcement officials from the Police, it takes a high level of ability and commitment from law enforcers, in this case investigators and the Police institution, to conduct investigations in such a way that the performance of eradicating corruption by the Police can be carried out more optimally. The purpose of this study is to understand and analyze the criminal act of corruption of village treasury land in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 in Satria Jaya Village, North Tambun Kec. Bekasi Kab. West Java Study of Supreme Court Decision Number 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. and to find out the role of investigators and the obstacles faced in handling criminal acts of corruption of village treasury land in Satria Jaya Village, North Tambun Kec. Bekasi Kab. West Java Supreme Court Decision Number 27/Pid.Sus-TPK/PN Bdg. This research uses normative juridical research. The problem approaches used in this research include the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. Based on the results of the research, it is found that the types and causes of misuse of village assets are: a) Errors due to ignorance (mechanism); b) Not according to plan: unclear designation; not according to specifications; c) Not according to guidelines, especially Juklak (Implementation Guidelines) and Juknis (Technical Guidelines), especially the procurement of goods and services, d) Administration of financial statements: mark-up and mark-down, double counting, e) Reduction of Village Fund Allocation; for example, village funds are used as "coffers" for village heads and officials for personal interests; f) Unable to account for use; g) Misappropriation of village assets: sale or swap of village cash land (Bengkok); rental of village cash land (TKD) to which they are not entitled, for example, for housing property business; h) Analysis of Supreme Court Decision Number 27 (Pid. Sus-TPK/2021/PN Bdg). Based on Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption in conjunction with Law No. 20 of 2001, the defendant must be declared legally and convincingly proven not to have committed a crime as charged in the subsidiary indictment.

Keywords: *Corruption, Village Assets, Police Investigators.*